

# EKOTRANS

## Penelitian

- Pengaruh Metode Latihan dan Motivasi Terhadap Kemampuan Lari 100 Meter Siswa
- Analisis Fonologi Generatif Prefiks /meN-/ sebagai Pembentuk Kata Kerja Turunan dalam Bahasa Serawai
- Analisis Tingkat Pemahaman Prinsip-Prinsip *Good Governance* Oleh Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
- Pengaruh Metode Repetisi dan Metode Interval Intensif Terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas 50 Meter (Studi Eksperimen Pada Atlet Klub Profi Swimming Kota Padang)
- Pengaruh Gaya Latihan, Gaya Komando Dan Minat Bermain Terhadap Keterampilan Dasar Bolavoli
- Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Kabupaten Karimun
- Pengaruh *Current Ratio*, *Debt To Equity Ratio* *Return On Equity* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Harga Saham Pada Industri Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013
- Analisis Pengaruh Motivasi, Karakteristik Individu, Kemampuan Individu, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Universitas Karimun



Diterbitkan :  
Pusat Studi Ekonomi dan Sosial  
Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Universitas Ekasakti  
PADANG

## Analisis Tingkat Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

Doni Putra Utama  
Universitas Karimun

### Abstract

*This research is quantitative descriptive study with title of "The Analysis of Understanding Level of Good Governance Principles Towards The Government of Karimun." The aim of research is to find out how the understanding level of good governance principles towards the government of karimun. This measurement is using with the questioner. Which the questioner has some questions about understanding of the good governance principles. The questioner is test with descriptive statistical. Based on analysis result, it can be concluded that 70,21 percent employees of the government of Karimun have a good understanding level of the good governance principles, which the categorize of easier understanding are visionary, accountability, and participation. Otherwhise, the categorize of difficulty understanding are transparency, commitment to reduce inequality, commitment to environmental protection, and efficiency and effectiveness.*

*Keywords : Good Governance, Pemerintah*

### I. Pendahuluan

Proses penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan penyediaan public goods and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Agar Good Governance menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri (BPKP,2000).

Untuk membangun good governance, diperlukan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya partnership diantara stakeholder di dalam lokalitas tersebut. Partnership adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.

Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan good governance diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki

oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan terhadap perjuangan bangsa dan Negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS), salah satunya melalui melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan PNS secara menyeluruh yang mengacu pada kompetensi jabatan. Sehingga dengan adanya pelatihan dan pendidikan tentang prinsip-prinsip good governance diharapkan para PNS dapat memahami prinsip-prinsip tersebut dan penerapan good governance dapat terlaksana dengan baik.

## II. Analisa Dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai pemahaman prinsip-prinsip good governance oleh aparatur pemerintah daerah karimun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Gambaran umum dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini. Secara umum, pemahaman pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan statistik nilai pemahaman rata-rata (mean) sebesar 7,7719 (lihat Tabel 4.1), maupun persentase jumlah responden yang memiliki nilai pemahaman di atas 6,5 (lower quartile).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat responden yang tidak memahami prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini ditunjukkan dengan munculnya nilai minimum 4 (lihat Tabel 4.1) yang artinya terdapat responden yang memberi jawaban yang salah terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan. Sebaliknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat responden yang mampu menjawab dengan benar terhadap hampir semua pertanyaan yang diajukan. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya nilai 11,5 sebagai nilai yang paling tinggi didapatkan.

Tabel 1  
Statistik Nilai Pemahaman

N	Valid	141
	Missing	0
Mean		7.7199
Median		7.5000
Minimum		4.00
Maximum		11.50
Percentiles	25	6.5000
	50	7.5000
	75	8.5000

### Hasil Analisis

Dengan melihat sebaran berdasarkan nilai pemahaman sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, modus dari nilai pemahaman adalah 7 sampai dengan 8,5 yang meliputi 76 responden atau 53,90 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pada umumnya responden memiliki nilai pemahaman yang cukup baik.

Dari Tabel 2, responden yang memiliki nilai pemahaman di atas 6,5 (yang dapat dimasukkan kategori cukup baik sampai baik) seluruhnya berjumlah 99 responden atau 70,21 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar responden cukup memahami prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 2

Jumlah Responden Pada Setiap Nilai Pemahaman Terhadap 14 Prinsip

Nilai Pemahaman	Jumlah Responden	Persen	Persen Kumulatif
0.0	0	0	0
0.5	0	0	0
1	0	0	0
1.5	0	0	0
2	0	0	0
2.5	0	0	0
3	0	0	0
3.5	0	0	0
4	1	1	1
4.5	2	1	2
5	6	4	6
5.5	6	4	10
6	8	6	16
6.5	19	13	29
7	15	11	40
7.5	19	13	53
8	22	16	69
8.5	11	8	77
9	9	6	83
9.5	1	1	84
10	6	4	88
10.5	10	8	96
11	3	2	98
11.5	3	2	100
12	0	0	0
12.5	0	0	0
13	0	0	0
13.5	0	0	0
14	0	0	0
Total	141	100	

Tabel 3  
Presentase Responden Pada Setiap Kategori Pemahaman Terhadap  
Setiap Prinsip

Prinsip	% Memahami	% Cukup Memahami	% Tidak Memahami
Prinsip 1 (Visioner)	57	37	6
Prinsip 4 (Akuntabel)	42	45	13
Prinsip 9 (Partisipatif)	41	46	13
Prinsip 5 (Profesional & Kompeten)	40	53	7
Prinsip 11 (Supremasi Hukum)	35	50	15
Prinsip 10 (Kemitraan)	33	63	4
Prinsip 12 (Pengurangan Kesenjangan)	33	25	42
Prinsip 13 (Komitmen Pasar)	32	48	20
Prinsip 14 (Lingkungan Hidup)	31	32	37
Prinsip 3 (Responsif)	26	53	21
Prinsip 8 (Demokratis)	25	54	21
Prinsip 7 (Desentralistis)	25	51	24
Prinsip 6 (Efisien&Efektif)	18	45	37
Prinsip 2 (Transparan)	14	35	51

Berdasarkan persentase responden pada setiap kategori pemahaman pada masing-masing prinsip *good governance* (Tabel 4.3), maka Prinsip-1 yaitu tata pemerintahan yang mempunyai pandangan jauh kedepan (Visioner) merupakan prinsip yang dipahami dengan baik oleh 57 persen responden. Angka ini merupakan persentase paling besar di antara prinsip-prinsip lainnya.

Di urutan kedua dengan persentase 42 persen adalah pemahaman pada Prinsip-4 yaitu tata pemerintahan yang akuntabel. Sedangkan urutan ketiga dengan persentase 41 persen adalah pemahaman pada Prinsip-9 yaitu tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat (Partisipatif).

Sebaliknya, untuk prinsip-prinsip yang tidak dipahami, pada urutan kesatu adalah Prinsip-2 yaitu tata pemerintahan yang bersifat terbuka (Transparan) yang menjadi prinsip dalam kategori tidak dipahami dengan persentase responden yang tidak memahami sebesar 51 persen. Di urutan kedua dengan persentase 42 persen adalah pemahaman pada Prinsip-12 yaitu tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Sedangkan urutan ketiga adalah Prinsip 14 dan 6 yaitu tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup dan tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif dengan 37 persen responden.

### Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Analisa korelasi untuk memperoleh hubungan antara faktor usia, jenis kelamin, unit kerja, tingkat pemerintahan, masa kerja, pendidikan terakhir, dan jabatan dengan pemahaman responden dilakukan dengan mengelompokkan responden dalam empat kategori pemahaman berdasarkan statistik sebaran nilai pemahaman responden pada keseluruhan prinsip sebagaimana pada Tabel 4.

Setelah melalui empat tahap seleksi atas 7 (tujuh) faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat pemahaman responden diperoleh 4 (empat) faktor yang bermakna nyata yaitu: jenis unit kerja, masa kerja, pendidikan, dan jabatan dengan urutan sebagaimana pada Tabel 5. Di antara empat faktor yang mempengaruhi, faktor jabatan dan pendidikan merupakan faktor yang paling mempengaruhi tingkat pemahaman.

Tabel 4

Interval Nilai Pemahaman Total

Interval Nilai	Kategori
0-<6,5	Sangat rendah
6,5-7,5	Rendah
7,5-8,5	Cukup
>8,5	Baik

Tabel 5

Statistik Pembentukan Model hubungan Identitas Responden dengan Nilai Pemahaman Total

Pemahaman	Hubungan Korelasi	Sig. (2-tailed)
Unit Kerja	0.065	0.447
Lama Bekerja	0.028	0.738
Pendidikan Terakhir	0.279	0.001
Jabatan	0.296	0.000

Pada umumnya, pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperoleh dari Media Cetak yaitu sebesar 61 persen responden, dan urutan kedua diikuti oleh Pendidikan Formal yaitu sebesar 53 persen responden, dan urutan ketiga ditempati oleh Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan yaitu sebesar 52 persen responden.

Tabel 6

Sumber Informasi Pengetahuan dan Pemahaman

Sumber	Presentase
Media Cetak	61
Pendidikan formal	53
Pendidikan & Pelatihan penjenjangan	52
Pendidikan & Pelatihan fungsional	45
Media Elektronik	45
Ceramah/pertemuan ilmiah	40
Pengarahan Pimpinan	37

Dengan demikian, media cetak, pendidikan formal, serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan dapat dipandang sebagai sarana yang cukup memadai untuk sosialisasi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

#### Pembahasan

##### Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan

Wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan, dan mampu merumuskan gagasan-gagasan dengan visi dan misi untuk perbaikan maupun pengembangan pelayanan dan menuangkannya dalam strategi pelaksanaan, rencana kebijakan dan program-program kerja ke depan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Tabel 7

Pemahaman Responden terhadap Prinsip-1

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	9	6
Cukup memahami	51	37
Memahami	81	57
Total	141	100

Di antara 14 prinsip tata pemerintahan yang baik, prinsip ini merupakan prinsip yang memiliki persentase responden yang paling terbesar yang pada kategori memahami sepenuhnya (lihat Tabel 3). Sebaliknya, di dalam Tabel 7, hanya terdapat 9 responden atau 6 persen yang tidak memahami prinsip tata pemerintahan yang berwawasan ke depan. Dengan demikian secara keseluruhan bahwa terdapat 132 responden atau 94 persen dapat dinilai memahami prinsip ini dengan baik termasuk sebanyak 81 responden atau 57 persen yang memahami sepenuhnya prinsip ini.

Berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden, lebih jauh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi dan substansi suatu rencana strategis.

##### Tata pemerintahan yang bersifat terbuka

Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap tahap pengambilan keputusan dapat ditengarai dengan derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu kebijakan publik. Setiap kebijakan publik termasuk kebijakan alokasi anggaran, pelaksanaannya maupun hasil-hasilnya mutlak harus diinformasikan kepada publik atau dapat diakses oleh publik selengkap-lengkapnya melalui berbagai media dan forum untuk mendapat respon.

Tabel 8  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-2

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	72	51
Cukup memahami	50	35
Memahami	19	14
Total	141	100

Tingkat pemahaman pada prinsip ini perlu mendapat perhatian karena merupakan prinsip yang memiliki persentase terkecil dari responden yang memahami sepenuhnya. Prinsip ini juga memiliki persentase terbesar dari responden yang tidak memahami (lihat Tabel 3).

Prinsip ini hanya dipahami dengan baik oleh 19 responden atau 14 persen. Akan tetapi, di dalam Tabel 4-8, walaupun terdapat sejumlah besar responden (72 responden atau 51 persen) yang tidak memahami prinsip tata pemerintahan yang bersifat terbuka, persentase responden yang dapat dikategorikan memahami prinsip ini masih merupakan sebagian besar dari responden yaitu 69 responden atau 49 persen.

Dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa pemahaman mengenai prinsip transparansi dalam pemberian dan penyediaan informasi kepada publik masih terbatas pemahamannya. Khususnya berkaitan dengan anggaran, informasi ini masih dipahami sebagai informasi yang tidak perlu disampaikan kepada publik.

#### Tata pemerintahan yang cepat tanggap

Kebutuhan akan karakteristik ini karena selalu adanya kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan suatu kebijakan. Karakteristik ini juga dibutuhkan karena tidak ada rancangan yang sempurna sehingga berbagai prosedur dan mekanisme baku dalam rangka pelayanan publik perlu segera disempurnakan atau diambil langkah-langkah penanganan segera. Bentuk kongkritnya dapat berupa tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan adanya unit yang khusus menangani krisis, dan pengambilan keputusan serta tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan cepat.

Tabel 9  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-3

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	29	21
Cukup memahami	75	53
Memahami	37	26
Total	141	100

Di antara 14 prinsip tata pemerintahan yang baik, pemahaman terhadap prinsip ini termasuk cukup memadai (lihat Tabel 9) karena sebagian besar (112 responden atau 79 persen) dapat dikategorikan memahami prinsip

ini. Terhadap prinsip ini di dalam Tabel 9, hanya terdapat 29 responden atau 21 persen yang tidak memahami prinsip ini.

Tata pemerintahan yang akuntabel

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. Akuntabilitas juga dituntut dalam hubungannya dengan masyarakat/publik, dengan instansi atau aparat di atas. Secara substansi, penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada sistem dan prosedur tertentu, memenuhi ketentuan perundangan, dapat diterima secara politis, berdasarkan pada metode dan teknik tertentu maupun nilai-nilai etika tertentu, serta dapat menerima konsekuensi bila keputusan yang diambil tidak tepat.

Tabel 10  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-4

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	18	13
Cukup memahami	63	45
Memahami	60	42
Total	141	100

Di dalam hal ini, terdapat 18 responden atau 13 persen yang masuk kategori tidak memahami prinsip ini, namun sebagian besar 123 responden atau 87 persennya masuk kategori memahami prinsip ini (lihat Tabel 10). Dibandingkan dengan prinsip-prinsip lain secara keseluruhan, di dalam Tabel 4.3, pemahaman pada prinsip ini berada pada posisi kedua dengan persentase yang memahami dengan baik (42 persen).

Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi

Tata pemerintahan dengan karakteristik seperti ini akan tampak dari upaya-upaya mengorganisasikan kegiatan dengan cara mengisi posisi-posisi dengan aparat yang sesuai dengan kompetensi, termasuk di dalamnya kriteria jabatan dan mekanisme penempatannya. Di samping itu, terdapat upaya-upaya sistematis untuk mengembangkan profesionalitas sumber daya manusia yang dimiliki unit yang bersangkutan melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tabel 11  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-5

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	10	7
Cukup memahami	75	53
Memahami	56	40
Total	141	100

Pemahaman responden pada prinsip ini dapat dikatakan masih cukup baik mengingat masih cukup besarnya persentase responden yang memahami maupun cukup memahami yaitu 40 persen dan 53 persen (lihat Tabel 11). Terhadap prinsip ini, terdapat 10 responden atau 7 persen yang tidak memahami prinsip ini. Sisanya (131 responden atau 93 persen) dapat dianggap memahami prinsip ini walaupun responden yang memahami sepenuhnya hanya 56 responden atau 40 persen.

Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif

Upaya untuk menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif merupakan salah satu respon atas tuntutan akuntabilitas. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan perlu secara terus menerus ditingkatkan dan dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya dan organisasi yang efektif dan efisien, termasuk upaya-upaya berkoordinasi untuk menciptakan sinergi dengan berbagai pihak dan organisasi lain.

Tabel 12  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-6

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	52	37
Cukup memahami	63	45
Memahami	26	18
Total	141	100

Pemahaman terhadap prinsip ini termasuk yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan prinsip lain karena terdapat peringkat ketiga dari pemahaman yang tidak memahami (lihat Tabel 3). Di dalam prinsip ini terdapat 52 responden atau 37 persen yang tidak memahami, sedangkan 89 responden atau 63 persen dapat dinilai memahami prinsip ini.

Tata pemerintahan yang terdesentralisasi

Tata pemerintahan yang memiliki karakteristik seperti ini tampak dari adanya pendelegasian wewenang sepenuhnya yang diberikan kepada aparat dibawahnya sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi pada tingkat dibawah sesuai lingkup tugasnya. Pendelegasian wewenang tersebut semakin mendekatkan aparat pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 13  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-7

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	34	24
Cukup memahami	72	51
Memahami	35	25
Total	141	100

Dibandingkan dengan prinsip lainnya, pemahaman pada prinsip ini termasuk dalam peringkat sedang (lihat Tabel 3). Jumlah responden yang tidak

memahami prinsip ini berjumlah 34 responden atau 24 persen (lihat tabel 13). Sisanya (107 responden atau 76 persen) dapat dianggap memahami prinsip ini walaupun yang memahami sepenuhnya hanya sebesar 35 responden atau 25 persen responden.

Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus

Prinsip ini menjunjung tinggi penghormatan hak dan kewajiban pihak lain. Dalam suatu unit pemerintahan, pengambilan keputusan yang diambil melalui konsensus perlu dihormati.

Tabel 14

Pemahaman Responden terhadap Prinsip-8

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	29	21
Cukup memahami	76	54
Memahami	36	25
Total	141	100

Dibandingkan dengan pemahaman pada prinsip lainnya, pemahaman pada prinsip ini termasuk dalam urutan bawah dengan jumlah responden yang memahami sepenuhnya berjumlah 36 responden atau 25 persen dan yang tidak memahami berjumlah 29 responden atau 21 persen.

Walaupun demikian, prinsip ini masih dapat dikatakan dipahami mengingat secara keseluruhan besarnya jumlah responden yang tidak memahami masih lebih kecil daripada jumlah responden yang memahami. Akan tetapi pemahaman pada prinsip ini perlu mendapat perhatian mengingat persentase yang tidak memahami cukup besar. Dikaitkan dengan pertanyaan yang diajukan kepada responden, dapat ditarik kesimpulan lebih lanjut bahwa lembaga perwakilan belum dianggap sebagai cermin suatu tata pemerintahan yang demokratis. *Stakeholder* dalam bentuk yang informal lebih dianggap mampu membawa aspirasi.

Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat pada hakekatnya mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Tabel 15

Pemahaman Responden terhadap Prinsip-9

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	18	13
Cukup memahami	65	46
Memahami	58	41
Total	141	100

Secara keseluruhan prinsip ini dipahami sebagian besar responden (123 responden atau 87 persen). Jumlah responden yang tidak memahami prinsip ini berjumlah 18 responden atau 13 persen, dan hal ini dapat dianggap

memahami prinsip ini walaupun yang memahami sepenuhnya hanya sebesar 58 responden atau 41 persen responden.

Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat

Pemerintah dan masyarakat saling melengkapi dan mendukung (mutualisme) dalam penyediaan "public goods" dan pemberian pelayanan terhadap publik.

Tabel 16  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-10

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	5	4
Cukup memahami	89	63
Memahami	47	33
Total	141	100

Di antara prinsip lainnya, jumlah responden yang memahami prinsip ini relatif cukup besar (lihat Tabel 3) yaitu 47 responden atau 33 persen memahami sepenuhnya prinsip ini (lihat Tabel 16). Secara keseluruhan, terdapat 136 responden atau 96 persen yang dapat dikategorikan memahami, sedangkan yang tidak memahami hanya berjumlah 5 responden atau 4 persen.

#### 11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum

Tata pemerintahan dengan karakter seperti ini tampak dengan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang selalu mendasarkan diri pada ketentuan perundangan yang berlaku dalam setiap pengambilan keputusan, bersih dari unsur "KKN" dan pelanggaran HAM, serta ditegakkannya hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran hukum.

Tabel 17  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-11

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	21	15
Cukup memahami	70	50
Memahami	50	35
Total	141	100

Prinsip ini termasuk dalam urutan prinsip yang dipahami oleh sebagian besar responden (120 responden atau 85 persen) termasuk didalamnya 50 responden atau 35 persen yang memahami sepenuhnya prinsip ini.

Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan

Prinsip ini berpihak kepada kepentingan kelompok masyarakat yang tidak mampu, tertinggal atau termajinalkan.

Tabel 18  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-12

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	59	42
Cukup memahami	36	25
Memahami	46	33
Total	141	100

Prinsip ini termasuk prinsip yang tidak dipahami oleh sejumlah besar responden yaitu 59 responden atau 42 persen (lihat Tabel 18). Di samping itu, hanya terdapat 46 responden atau 33 persen yang memahami sepenuhnya prinsip ini. Walaupun secara keseluruhan yang memahami prinsip ini cukup besar (82 responden atau 58 persen) namun mengingat persentase responden yang tidak memahami relatif termasuk cukup besar, maka prinsip ini perlu mendapatkan perhatian, prinsip ini adalah urutan kedua dari pemahaman yang tidak dipahami oleh responden (lihat Tabel 3).

Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar

Prinsip ini menyatakan dibutuhkan keterlibatan pemerintah dalam pemantapan mekanisme pasar.

Tabel 19  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-13

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	29	20
Cukup memahami	67	48
Memahami	45	32
Total	141	100

Secara keseluruhan prinsip ini dipahami oleh sebagian besar responden (112 responden atau 80 persen). Akan tetapi hanya terdapat 45 responden atau 32 persen responden yang memahami sepenuhnya sehingga prinsip ini masih perlu mendapat perhatian (lihat Tabel 19).

Tata pemerintahan yang dimiliki komitmen pada lingkungan hidup

Prinsip ini menegaskan keharusan setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk memperhatikan aspek lingkungan termasuk melakukan analisis secara konsisten dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan.

Tabel 20  
Pemahaman Responden terhadap Prinsip-14

Pemahaman	Jumlah Responden	Persen
Tidak memahami	52	37
Cukup memahami	45	32
Memahami	44	31
Total	141	100

Secara umum prinsip ini termasuk prinsip yang paling banyak memiliki responden yang tidak memahami (52 responden atau 37 persen). Jumlah responden yang tidak memahami prinsip ini merupakan urutan ketiga setelah Prinsip-12 mengenai pengurangan kesenjangan (lihat Tabel 3 dan Tabel 20). Di samping itu, hanya terdapat 44 responden atau 31 persen yang memahami sepenuhnya prinsip ini.

Pemahaman pada Prinsip-14 ini perlu mendapat perhatian mengingat persentase responden yang tidak memahami prinsip ini relatif cukup besar walaupun masih dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden memahami prinsip ini. Hal ini juga mengingat konsep-konsep pendekatan pengelolaan lingkungan hidup relatif merupakan konsep baru untuk aparatur pemerintah daerah kabupaten karimun.

### III. Penutup

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik kepada aparatur pemerintah perlu untuk dipertahankan, dan jika dipandang masih perlu ditingkatkan, hendaknya difokuskan kepada penerapan prinsip-prinsip yang strategis dan didalam pengambilan langkah-langkah kebijakan, adapun tingkat penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut menjadi modal bagi aparatur pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk melakukan perbaikan di setiap lingkup tugas dan unit yang dipimpinya, sehingga diperlukan pelaksanaan kegiatan yang mampu mendorong tumbuhnya komitmen tersebut.

Perlu juga difahami kiranya bahwa penerapan *good governance* ini, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme haruslah dilakukan melalui strategi pencegahan (preventif) dan strategi penindakan (represif) yang efektif dan seimbang.

### Daftar Pustaka

- LAN, BPKP, 2201. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara : Jakarta
- Sekretariat Pengembangan *Public Good Governance* Bappenas, 2002. *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang baik*, [www.goodgovernance-bappenas.go.id](http://www.goodgovernance-bappenas.go.id).
- Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Bappenas, 2005. *Pemerapan Tata Pemerintahan yang Baik*, [www.goodgovernance-bappenas.go.id](http://www.goodgovernance-bappenas.go.id).
- Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Bappenas, 2002. *Indikator Public Good Governance*, [www.goodgovernance-bappenas.go.id](http://www.goodgovernance-bappenas.go.id).
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, Bandung : Mandar Maju.